

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Untuk Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025

Jl. Raya Entikong
Sanggau- Kalimantan Barat 78557

KATA PENGANTAR

Sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah– kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan mengungkapkan secara memadai pos-pos laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai PMK nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersangkutan kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong. Di samping itu, laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Entikong, 31 Desember 2025
Plt. Kepala

Rahmat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos- Pos Laporan Relisasi Anggaran.....	18
C. Loaporan atas Pos –Pos Neraca.....	26
D. Penjelasan atas Pos –Pos Laporan Operasional.....	39
E. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	50
VI. Lampiran dan Daftar.....	51



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

JALAN RAYA ENTIKONG KM. 5, KEC. ENTIKONG, KAB. SANGGAU
KALIMANTAN BARAT 78557, TELEPON (0564) 31845, FAKSIMILE (0564) 31846
LAMAR www.kkp.go.id/ SUREL bkipmentikong@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Entikong, 31 Desember 2025
Plt. Kepala

Rahmat

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mengungkapkan secara memadai pos-pos laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai PMK nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari Anggaran Pendapatan Negara sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas Saldo awal pada 01 Januari 2025. Nilai Aset Tahun Anggaran 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,-; Piutang jangka panjang (neto) sebesar Rp.0,-; dan Aset tetap sebesar Rp. 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan – LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit - LO, yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-, jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 0,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (0),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos –

pos Luar Biasa masing – masing sebesar Rp. 0,- sehingga mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (0,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahunan pelaporan dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (0,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.00,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 0,- Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp. (0,-) sehingga Ekuitas Entitas sebesar Rp. 0,-. Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan dalam penyajian.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

PER 31 DES 2025 DAN 31 Des 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2025		% thd Angg	31 Des 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	104,220,000
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00	104,220,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0	1,742,855,877
Belanja Barang	B.4	-	-	0	1,399,027,973
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		-	-	#DIV/0!	3,141,883,850

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG NERACA

PER 31 DES 2025 DAN 31 DES 2024

URAIAN	CATATAN	Des TA 2025	Des TA 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	0	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	0	-
Persediaan	C.10	0	7,429,444
Jumlah Aset Lancar		0	7,429,444
PIUTANG JANGKA PANJANG		0	
Tagihan TP/TGR	C.11	0	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	0	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	-
ASET TETAP		0	
Tanah	C.14	0	1,535,698,120
Peralatan dan Mesin	C.15	0	4,051,484,824
Gedung dan Bangunan	C.16	0	6,874,390,107
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	0	932,129,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	0	100,114,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	0	(5,376,525,448)
Jumlah Aset Tetap		0	8,117,290,603
ASET LAINNYA		0	
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	-
Aset Lain-Lain	C.22	0	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0	-
Jumlah Aset Lainnya		0	-
JUMLAH ASET		0	8,124,720,047
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	0	-
Utang Yang Belum Diragihkan	C.26	0	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	0	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	-
JUMLAH KEWAJIBAN		0	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	0	8,124,720,047
JUMLAH EKUITAS		0	8,124,720,047
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0	8,124,720,047

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN ENTIKONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DES 2025 DAN 31 DES 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	DES 2025	DES 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	104,220,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	104,220,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	1,742,855,877
Beban Persediaan	D.3	0	21,650,376
Beban Barang dan Jasa	D.4	0	874,476,959
Beban Pemeliharaan	D.5	0	128,889,697
Beban Perjalanan Dinas	D.6	0	379,060,441
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	0	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	464,803,707
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	-
JUMLAH BEBAN		0	3,611,737,057
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			(3,507,517,057)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	-
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	-
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	-
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0	(3,507,517,057)
POS LUAR BIASA	D.12	0	-
Pendapatan PNB		0	-
Beban Perjalanan Dinas		0	-
Beban Persediaan		0	-
SURPLUS/DEFISIT LO		0	(3,507,517,057)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN ENTIKONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2025 DAN 31 DES 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	DES 2025	DES 2024
EKUITAS AWAL	E.1	0	11,191,528,189
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	0	(3,507,517,057)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	0	440,708,915
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		0	(3,066,808,142)
EKUITAS AKHIR	E.5	0	8,124,720,047

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Entikong Km. 5, Sanggau, Kalimantan Barat.

Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong berkomitmen dengan visi ***“menjamin hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah – langkah strategis sebagai berikut :

- Melaksanakan praktek kerja secara professional dalam melayani pelanggan,
- Melaksanakan manajemen dengan standar pelayanan prima,
- Melaksanakan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus,

- Memahami dan menerapkan kebijakan serta prosedur di dalam pekerjaan masing – masing personil sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- Memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025 yang berlaku dan meningkatkan efektivitas system manajemen secara berkelanjutan,
- Komitmen penuh dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi ISO 17020:2012 secara sistematis dan profesional.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomin yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip - prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi, aturan - aturan,

dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan–kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan–LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikonpensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Piutang yang timbul dari tuntutan Perbendaharaan /Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan /atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan

didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan penjualan angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh asset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan asset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
- Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke asset lain – lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – uundangan dibidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan asset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset tetap.
- Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan asset Penyusutan Aset dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain asset lancar, asset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain – lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Bagian yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas tahun setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Ekuitas

Selama periode berjalan, *Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	0	0
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	0	0

B. 1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan Rp.0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Entikong terdiri dari Pendapatan Jasa karantina Ikan dan Pendapatan lain – lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Jasa Karantina Ikan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 0

persen di bandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan telah penggabungan DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	0	104,220,000	100.00
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	0	104,220,000	(100.00)

B. 2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp 0,-*

Realisasi Belanja instansi Kantor Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,-. atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 0,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	-	#DIV/0!
Belanja Barang	0	-	#DIV/0!
Belanja Modal	0	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	0	-	-
Total Belanja Kotor	0	-	#DIV/0!
Pengembalian			-
Jumlah	0	-	#DIV/0!

1. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Belanja mengalami penurunan sebesar

100 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penggabungan DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak .

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	1,742,855,877	(100.00)
Belanja Barang	0	1,399,027,973	(100.00)
Belanja Modal	0	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	3,141,883,850	(100.00)

B. 3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing – masing sebesar RP 0,- dan Rp. 1.742.855.877,-Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari Tahunan TA 2024.

**Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan TA 2025
dan Tahunan TA 2024**

Belanja Pegawai

Rp 0,-

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	669,601,004	(100.00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	119,287,423	-
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	-
Belanja Lembur PNS	0	120,781,000	(100.00)
Belanja Lembur PPPK	0	17,447,450	
Belanja pegawai (tunjangan Khusus/kegiatan)	0	716,558,306	-
Khusus/kegiatan/kinerja PPPK	0	99,180,694	
Jumlah Belanja Kotor	0	1,742,855,877	(100.00)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	1,742,855,877	(100.00)

B. 4. Belanja Barang

Belanja Barang

Rp 0,-

Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1.399.027.973,-.

Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2025 mengalami penurunan 100 % dari Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2024. Hal ini disebabkan penggabungan DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak.

**Perbandingan Belanja Barang Tahunan TA 2025
dan Tahunan TA 2024**

URAIAN	REALISASI Tahunan TA 2025	REALISASI Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	687,912,793	(100.00)
Belanja Barang Non Operasional	0	0	#DIV/0!
Belanja Jasa	0	199,660,542	(100.00)
Belanja Pemeliharaan	0	128,889,697	(100.00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	379,060,441	(100.00)
Belanja Barang untuk persediaan	0	3,504,500	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	1,399,027,973	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	1,399,027,973	(100.00)

Belanja Modal

Rp. 0,-

B. 5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 159.069.600,-. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahunan TA 2025 sebesar RP 0,- dan Rp.159.069.600,- belanja modal Tahunan TA 2024. Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2025 mengalami penurunan 100 % dari Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2024. Hal ini disebabkan penggabungan DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	159.069.600	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	159.069.600	-100,00
Pengembalian			-
Jumlah Belanja	0	159.069.600	-100,00

B. 5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing- masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Tanah Tersebut pada Tahunan TA 2024 tidak ada pengadaan tanah pada TA 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Tahunan TA 2025	REALISASI Tahunan TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

**B. 5.2. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.159.069.600,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan TA 2025 mengalami penurunan 100 % dari Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2024. Hal ini disebabkan penggabungan DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA
2024*

URAIAN	REALISASI Tahunan TA 2025	REALISASI Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Sepeda Motor	0	0	0,00
Pompa Air	0	7.200.000	-100,00
Lemari Kayu	0	0	#DIV/0!
Genset	0	45.000.000	-100,00
Rak Kayu	0	0	0,00
Filing Cabinet Besi	0	0	#DIV/0!
Laci Box	0	0	0,00
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	0	27.000.000	-100,00
Kursi Besi/Metal	0	0	#DIV/0!
Sice	0	0	#DIV/0!
P.C. Unit	0	79.869.600	0,00
Meja Rapat	0	0	#DIV/0!
Meja Resepsionis	0	0	#DIV/0!
Kasur/Spring Bed	0	0	#DIV/0!
Meja Makan Besi	0	0	#DIV/0!
A.C. Split	0	0	0,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0,00
Alat Tennis Meja	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	159.069.600	-100,00
Jumlah Belanja	0	159.069.600	-100,00

B. 5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasai Belanja Modal Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Realisasi Belanja Modal TA 2024 tidak ada Tahunan TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Tahunan TA 2025	REALISASI Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
			0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B. 5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0,-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahunan TA 2025 tidak mengalami kenaikan dan Tahunan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Tahunan TA 2025	REALISASI Tahunan TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan Irigasi	0	0	#DIV/0!
Jaringan Listrik	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B. 5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan TA 2025 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Lainnya di Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong.

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Sosial pada Tahunan TA 2025 tidak mengalami

*Belanja Bantuan
Sosial Rp 0,-*

kenaikan dibandingkan pada Tahunan TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan di Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong.

Perbandingan Realisasi Belanja Sosial Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN	REALISASI Tahunan TA 2025	REALISASI Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan per 31 Desember 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

Keterangan	Tahunan 2025	Tahunan TA 2024
Uang Tunai	-	-
Bank MANDIRI	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-*

C. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini sudah menggunakan pembayaran non tunai yang langsung dibayarkan/disetor ke kas Negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024.

Keterangan	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
Uang Tunai	-	-
Bank MANDIRI	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas 0,-*

C. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Tahunan TA 2025 dan Tahunan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan per 31 Desember 2025 dan Tahunan per 31 Desember 2024

Keterangan	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

C. 4 Piutang PNB

Piutang PNB Rp 0,-

Saldo Piutang PNB Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024.

Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

C. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.10.097.917,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR Telah diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejangka pelaporan.

C. 6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp.0,-*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran TahunanTA 2025 dan Tahunan TA 2024

No	Nama	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

C. 7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0,-*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancer yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar
Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0,-

C. 8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing – masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Tahunan TA 2025 dan Tahunan 2024

Jenis	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0,-

C. 9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing- masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

Jenis	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C. 10 Persediaan

Persediaan

Rp. 0,-

Nilai Persediaan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 7.429.444,.-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

Jenis	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
Barang Konsumsi	0	7,429,444
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang	0	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	-
Bahan Baku	0	-
Jumlah	0	7,429,444

Semua jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C. 11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR

Rp 0,-

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

No	Debitur	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		0	0
Jumlah		-	-

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp 0,-*

C. 12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0,- dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran untuk masing - masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

No	Debitur	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp 0 ,-*

C. 13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang jangka Panjang merupakan

estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahunan TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp 0,-

C. 14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp1.535.698.120,-.

Terdapat transfer keluar Tanah berupa Tanah Kantor BKIPM Entikong ke Stasiun KIPM Pontianak senilai Rp 1.535.698.120,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	1,535,698,120
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Tanah	0
Mutasi kurang:	
Penggabungan Aset ke Stasiun KIPM Pontianak	1,535,698,120
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo 31 Des 2024	0

C. 15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp 0,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah Rp.0,- dan Rp.4.051.484.824,-. Terdapat transfer keluar berupa Peralatan dan Mesin yaitu penggabungan Peralatan dan Mesin BKIPM Entikong ke Stasiun KIPM Pontianak senilai Rp 4.051.484.824,-. dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Des 2024	4,051,484,824
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Akuisisi aset ke Stasiun KIPM Pontianak	4,051,484,824
Saldo Per 31 Des 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	0
Nilai Buku per 31 Des 2025	0

C. 16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp. 0,-*

Nilai Gedung dan Bangunan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah Rp. 0 dan Rp.6.874.390.107. Terdapat transfer keluar berupa Gedung dan Bangunan yaitu penggabungan Gedung dan Bangunan BKIPM Entikong ke Stasiun KIPM Pontianak senilai Rp 6.874.390.107,- dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6,874,390,107
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Gedung	-
Penambahan Revaluasi aset	-
Mutasi kurang:	
Akuisisi aset ke SKIPM Pontianak	6,874,390,107
Penghentian aset dari penggunaan	-
Revaluasi aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp 0,-*

C. 17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 932.129.000. Terdapat transfer keluar berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke BKHIT Kalimantan Barat senilai Rp 932.129.000,- dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	932,129,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Penambahan Hasil Revaluasi	-
Mutasi kurang:	
Akuisisi aset ke SKIPM Pontianak	932,129,000
Pengurangan Hasil Revaluasi	-
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

*Aset Tetap Lainnya
Rp 0,-*

C. 18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah Rp.0,- dan Rp.100.114.000,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahunan TA 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	100,114,000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
Akuisisi Aset ke SKIPM Pontianak	100,114,000
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

C. 19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0,-*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan pembangunan tahun 2025 sampai dengan tanggal neraca dan pembangunan gedung dan bangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong. Tidak terapat KDP terdiri dalam pembangunan gedung/ bangunan Tahunan TA 2025.

C. 20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp (0,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing Rp. (0) dan Rp. (0). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahunan TA 2025*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan dan jembatan	0	0	0
4	Jaringan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C. 21 Aset Tak Terwujud

Aset Tak Berwujud
Rp 0,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah Rp 0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C. 22 Aset Lain – Lain

Aset Lain-Lain
Rp 0,-

Saldo Aset Lain-lain Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- Penghentian asset	-
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C. 23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing Rp. (0) dan Rp. (0). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C. 24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp. 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.0,-*

C. 25 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per Tahunan TA 2025 dan per Tahunan TA 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 13,096,376,-. Tahun 2025 tidak terdapat utang kepada Pihak Ketiga.

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp0,-*

C. 26 Pendapatan diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp 0*

C. 27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024*

Uraian	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp 0,-*

C. 28 Ekuitas

Ekuitas Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 11.575.194.414,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. 1 Pendapatan Penerimaana Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 104.220.000,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan Jasa	0	104,220,000	(100)	
Pendapatan Lain-lain	0	0	0	
Jumlah	0	104,220,000	(100)	

Pendapatan Jasa berasal dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya. Tidak ada Pendapatan Lain-Lain Tahun 2025.

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp. 0,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran per 31 Desember 2025 dan Tahun Anggaran per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1.742.855.877,-

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban gaji Pokok PNS	0	475,943,200	(100)
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	8,012	(100)
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	
Beban Tunjangan Suami/istri PNS	0	36,542,900	(100)
Beban Tunjangan anak PNS	0	13,018,000	(100)
Beban Tunjangan Struktural PNS	0	16,200,000	(100)
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS			
Beban Tunjangan Fungsional PNS	0	35,485,000	(100)
Beban Tunjangan PPh PNS	0	2,380,142	(100)
Beban Tunjangan Beras PNS	0	29,692,200	(100)
Beban Uang Makan PNS	0	59,071,550	(100)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,260,000	(100)
Beban Gaji Pokok PPPK	0	83,984,720	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	1,239	
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,274,880	
Beban Tunjangan Anak PPPK	0	768,864	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	7,150,000	
Beban Tunjangan Beras PPPK	0	4,779,720	
Beban Uang Makan PPPK	0	15,328,000	
Beban Uang Lembur PNS	0	120,781,000	(100)
Beban Uang Lembur PPPK	0	17,447,450	
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PNS	0	716,558,306	(100)
Beban Pegawai(Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	99,180,694	
Jumlah	0	1,742,855,877	(100)

Beban Persediaan
Rp. 0,-

D. 3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 21.650.376,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	0	21,650,376	(100)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges, Suku Cadang			#DIV/0!
Beban Persediaan bahan baku			#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	-	
Jumlah	0	21,650,376	(100)

D. 4 Beban barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp. 0,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 874.476.959,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	0	528,319,871	(100.00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	45,557,000	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	4,811,537	(100.00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	77,520,000	(100.00)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	11,045,000	(100.00)
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	0	18,670,535	(100.00)
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	0	90,995,729	(100.00)
Beban Langganan Telepon	0	1,336,204	(100.00)
Beban Langganan Air	0	9,443,200	0.00
Beban Sewa	0	0	0.00
Belanja Jasa Profesi	0	0	0.00
Beban langganan daya dan jasa lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	0	86,777,883	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin			
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran			#DIV/0!
Jumlah	0	874,476,959	(100.00)

D. 5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp 0,-*

Beban Pemeliharaan pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.128.889.697,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi COVID	0	0	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	128,889,697	(100.00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			0.00
Beban Persediaan suku cadang	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan BMP dan Pelumas Khusus Non Pertamina			
Beban Pemeliharaan Jaringan			
Jumlah	0	128,889,697	(100.00)

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp 0,-*

Beban Perjalanan Dinas pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 379.060.441,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	379,060,441	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			#DIV/0!
Jumlah	0	379,060,441	-100.00

D. 7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp 0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024.

URAIAN JENIS BEBAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D. 8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp 0,-

Beban Bantuan Sosial Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	% NAIK (TURUN)
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 0,-*

D. 9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp. 464.803.707,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	206,927,805	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	164,054,208	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	91,446,694	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	2,375,000	-
Jumlah Penyusutan	0	464,803,707	-
Beban Amortisasi Software	0	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	0	-	-
Jumlah Amortisasi	0	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	464,803,707	-

D. 10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp 0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp 0,-

11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024.

URAIAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Pos Luar Biasa
Rp 0,-

D. 12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024

URAIAN	Tahunan TA 2025	Tahunan TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. 1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp 0,-

Nilai ekuitas pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 11.191.528.189,-.

E. 2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

Rp (0,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp (3.507.517.057) . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E. 3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E. 3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Rp 0,-

Nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E. 3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai

Aset Rp 0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E. 3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan Rp 0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk

Tahunan TA 2025 dan Tahunan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp (0,-)*

E. 3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (0) dan Rp(0)

E. 3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun Anggaran 2025.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

E. 3.6 Koreksi Lain – Lain

*Koreksi Lain-Lain Rp
0,-*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp 440.708.915,-*

E. 4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp 0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	0

E. 4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode Tahunan TA 2025, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp0,-.

E. 4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada

internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,- transfer Keluar Rp.0,-. terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	Sekretariat BKIPM	0
2	Aset BMN	bkhit kalimantan Barat	0
	Jumlah		0

E. 4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0,- Rincian pengesahan Hibah untuk Tahunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	0	0	Rp -
2	0	0	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran.

E. 5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Tahunan per 31 Desember TA 2025 dan Tahunan per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Ekuitas Akhir

Rp 0,-

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F. 1 Kejadian – Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Laporan Tahunan TA 2025 tidak terdapat hal yang dianggap sebagai kejadian yang mendesak untuk dilakukan tindakan lanjutan.

F. 2 Pengungkapan Lain – Lain

1. DIPA Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong T.A. 2025 dimerger ke DIPA Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak.
2. Pada Tahunan per 31 Desember TA 2025 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong tidak terdapat utang kepada pihak ketiga senilai Rp 0,- (nol rupiah).
3. Tidak ada Capaian Output Strategis per Desember 2025
4. Tidak ada Program prioritas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG 649568

Tgl Data : 10/01/26 2:17 PM
Tgl Cetak : 10/01/26 9:33 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	84,000,000	104,220,000	20,220,000	124.07
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	84,000,000	104,220,000	20,220,000	124.07
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	84,000,000	104,220,000	20,220,000	124.07
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	0	0	0	0	3,171,036,000	3,141,883,850	(29,152,150)	99.08
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	1,744,373,000	1,742,855,877	(1,517,123)	99.91
2. Belanja Barang	0	0	0	0	1,426,663,000	1,399,027,973	(27,635,027)	98.06
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG 649568

Tgl Data : 10/01/26 2:17 PM
Tgl Cetak : 10/01/26 9:33 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	0	0	0	0	3,171,036,000	3,141,883,850	(29,152,150)	99.08
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
null
null
null

ENTIKONG, 10 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JAWAWI
NIP 197705202000031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (649568) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Tgl Data : 10/01/26 2:17 PM
Tgl Cetak : 10/01/26 9:32 PM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	7,429,444	(7,429,444)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	7,429,444	(7,429,444)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	0	1,535,698,120	(1,535,698,120)	(100.00)
Peralatan dan Mesin	0	4,051,484,824	(4,051,484,824)	(100.00)
Gedung dan Bangunan	0	6,874,390,107	(6,874,390,107)	(100.00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	932,129,000	(932,129,000)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	0	100,114,000	(100,114,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	0	(5,376,525,448)	5,376,525,448	(100.00)
JUMLAH ASET TETAP	0	8,117,290,603	(8,117,290,603)	(100.00)
JUMLAH ASET	0	8,124,720,047	(8,124,720,047)	(100.00)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	8,124,720,047	(8,124,720,047)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	8,124,720,047	(8,124,720,047)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	8,124,720,047	(8,124,720,047)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	8,124,720,047	(8,124,720,047)	(100.00)

Keterangan :
null
null
null

ENTIKONG, 10 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JAWAWI
NIP 197705202000031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (649568) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG
Tgl Data : 10/01/26 2:17 PM
Tgl Cetak : 10/01/26 9:34 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

Keterangan :
null
null
null
ENTIKONG, 10 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JAWAWI
NIP 197705202000031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (649568) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Tgl Data : 10/01/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 10/01/26 9:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

Keterangan :

null

null

null

ENTIKONG, 10 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JAWAWI

197705202000031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (649568) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Tgl Data : 10/01/26 2:17 PM

Tgl Cetak : 10/01/26 9:30 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	104,220,000	(104,220,000)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	104,220,000	(104,220,000)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	104,220,000	(104,220,000)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,742,855,877	(1,742,855,877)	(100)
Beban Persediaan	0	21,650,376	(21,650,376)	(100)
Beban Barang dan Jasa	0	874,476,959	(874,476,959)	(100)
Beban Pemeliharaan	0	128,889,697	(128,889,697)	(100)
Beban Perjalanan Dinas	0	379,060,441	(379,060,441)	(100)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (649568) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Tgl Data : 10/01/26 2:17 PM

Tgl Cetak : 10/01/26 9:30 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	464,803,707	(464,803,707)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	0	3,611,737,057	(3,611,737,057)	(100)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	0	(3,507,517,057)	3,507,517,057	(100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0	(3,507,517,057)	3,507,517,057	(100)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	0	(3,507,517,057)	3,507,517,057	(100)

Keterangan :	ENTIKONG, 10 Januari 2026
null	Penanggung Jawab UAKPA
null	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
null	

JAWAWI
NIP 197705202000031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (649568) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Tgl Data : 10/01/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 10/01/26 9:31 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
--------	------	------	------------------------	-----

Keterangan :
null
null
null

ENTIKONG, 10 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JAWAWI
NIP 197705202000031001